

ANALISIS KUALITAS SDM PENGELOLA LAPORAN KEUANGAN DAN PENGEMBANGAN USAHA BUMDES DI DESA BOTTOMALLANGGA ENREKANG

*Analysis of Human Resource Quality in Financial Reporting and Business
Development of BUMDes in Bottomallangga Village, Enrekang*

Dewi Khaerani Herman¹, Syarifuddin Yusuf², Akhsan³, Sariana Damis⁴

Email: dkhaerani8@gmail.com¹, syarifuddin6798@gmail.com², akhsan1870@gmail.com³,
sarianadamis@gmail.com⁴

^{1,4}Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare

²Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare

³Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare

Jl. Jend. Ahmad Yani Km. 6, Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91131

Abstrak

Tujuan penelitian ini yaitu mengevaluasi kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Botto Mallangga, menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kinerja BUMDes, serta mengidentifikasi kendala dan peluang usaha yang ada. Manfaat dari penelitian ini bagi masyarakat desa adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dan infrastruktur melalui pengelolaan Dana Desa dan BUMDes yang lebih baik, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan BUMDes untuk kepentingan bersama. Secara praktis, penelitian ini memberikan panduan bagi pengelola BUMDes di Desa Botto Mallangga guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya desa. Objek dari penelitian ini adalah BUMDes Bottomallangga. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi, serta dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis deskriptif kualitatif. Setelah melakukan proses analisis, maka diperoleh hasil bahwa kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di BUMDes Bottomallangga masih terbatas, terutama dalam hal pengelolaan laporan keuangan. Sebagian besar pengelola BUMDes belum memiliki pengalaman pendidikan ekonomi, juga mereka tidak pernah mengikuti praktik terkait pengelolaan keuangan. Hal ini menyebabkan pengelolaan laporan keuangan yang masih dilakukan secara manual tanpa memanfaatkan teknologi. Pengembangan unit usaha BUMDes juga mengalami penurunan, yang disebabkan oleh munculnya pesaing dan masalah internal.

Kata Kunci : BUMDes Bottomallangga, SDM Pengelola Laporan Keuangan, Pengembangan BUMDes

Abstract

The purpose of this study is to evaluate the performance of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Botto Mallangga Village, investigate the factors that influence the low performance of BUMDes, and identify existing business obstacles and opportunities. The benefits of this study for the village community are improving the quality of public services and infrastructure through better management of Village Funds and BUMDes, encouraging active community participation in the management and development of BUMDes for the common good. Practically, this study provides guidance for BUMDes managers in Botto Mallangga Village to improve transparency, accountability, and professionalism in managing village finances and resources. The object of this study is BUMDes Bottomallangga. Data collection techniques used in this study were interviews, observation, and documentation. Data analysis used in this study was qualitative descriptive analysis. After conducting the analysis process, it was found that the quality of Human Resources (HR) in BUMDes Bottomallangga is still limited, especially in terms of managing financial reports. Most BUMDes managers do not have experience in economics education, nor have they ever participated in practices related to financial management. This results in financial report management that is still done manually without utilizing technology. The development of BUMDes business units has also experienced a decline, caused by the emergence of competitors and internal problems.

Keywords: BUMDes Bottomallangga, Human Resources for Financial Report Management, BUMDes Development

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi desa yang berfungsi sebagai penggerak aktivitas ekonomi berbasis potensi lokal. Keberadaan BUMDes diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan usaha yang produktif, transparan, dan akuntabel. Selain berorientasi pada keuntungan, BUMDes juga memiliki fungsi sosial dalam memperluas akses pelayanan ekonomi dan mendorong partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan [17], [18].

Pengelolaan BUMDes menuntut penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi keuangan. Pemerintah melalui berbagai regulasi menegaskan bahwa pengelolaan keuangan desa, termasuk BUMDes, harus dilakukan secara tertib, dapat dipertanggungjawabkan, dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang memadai [19], [5]. Dalam konteks akuntansi, BUMDes sebagai entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik secara luas sangat dianjurkan untuk menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) agar laporan keuangannya relevan, sederhana, dan mudah dipahami [3].

Namun, secara **faktual**, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan laporan keuangan BUMDes masih menghadapi banyak kendala, terutama pada aspek kualitas sumber daya manusia (SDM). Keterbatasan pengetahuan akuntansi, minimnya pelatihan, serta rendahnya pemanfaatan teknologi menyebabkan laporan keuangan BUMDes belum disusun sesuai standar yang berlaku [16], [1]. Kondisi ini berdampak pada lemahnya akuntabilitas, rendahnya kepercayaan masyarakat, serta terhambatnya pengembangan unit usaha BUMDes [14].

Kualitas SDM menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan pengelolaan keuangan dan pengembangan usaha BUMDes. SDM yang memiliki kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan yang memadai akan mampu mengelola laporan keuangan secara sistematis serta merancang strategi pengembangan usaha yang berkelanjutan [4]. Sebaliknya, keterbatasan SDM berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan, pengambilan keputusan yang tidak berbasis data, serta kegagalan dalam menghadapi persaingan usaha [7].

Dalam perspektif tata kelola organisasi, kualitas laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan strategis. Laporan keuangan yang disusun secara andal dan sesuai standar memungkinkan pengelola BUMDes untuk mengevaluasi kinerja usaha, mengidentifikasi peluang pengembangan, serta mengendalikan risiko operasional secara lebih efektif [8]. Oleh karena itu, kemampuan SDM dalam memahami siklus akuntansi, menerapkan standar akuntansi, dan memanfaatkan informasi keuangan menjadi prasyarat penting bagi keberlanjutan usaha BUMDes [6]. Tanpa dukungan SDM yang kompeten, penerapan standar akuntansi hanya bersifat administratif dan belum mampu mendorong peningkatan kinerja usaha secara nyata.

Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu masih menempatkan BUMDes sebagai objek kajian dari sisi kelembagaan dan regulasi, sementara aspek internal organisasi khususnya kapasitas SDM pengelola laporan keuangan belum dikaji secara mendalam dalam kaitannya dengan pengembangan unit usaha [15], [12]. Padahal, dalam konteks desa, keterbatasan SDM sering kali menjadi faktor utama yang membedakan antara BUMDes yang berkembang dan BUMDes yang stagnan. Minimnya kajian empiris yang mengaitkan kualitas SDM, praktik penyusunan laporan keuangan, dan pengembangan usaha BUMDes menunjukkan adanya celah penelitian yang perlu diisi, terutama pada BUMDes yang beroperasi di wilayah pedesaan dengan keterbatasan akses pelatihan dan pendampingan akuntansi.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis kualitas SDM pengelola laporan keuangan serta pengembangan usaha BUMDes Bottomallangga. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam memperkuat pengelolaan BUMDes yang profesional, akuntabel, dan berkelanjutan, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa dalam meningkatkan kapasitas SDM dan kinerja BUMDes.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan fenomena secara mendalam berdasarkan kondisi nyata di lapangan [11]. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada proses pengelolaan laporan keuangan, kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan usaha BUMDes yang tidak dapat diukur secara kuantitatif semata, tetapi memerlukan pemahaman kontekstual dan interpretatif [2].

Lokasi penelitian adalah BUMDes Bottomallangga, yang beroperasi di wilayah pedesaan Kabupaten Enrekang. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa BUMDes tersebut telah menjalankan beberapa unit usaha dan menyusun laporan keuangan sebagai bentuk

pertanggungjawaban, namun masih menghadapi keterbatasan dalam pengelolaan akuntansi dan pengembangan usaha. Kondisi ini menjadikan BUMDes Bottomallangga relevan sebagai objek penelitian untuk mengkaji keterkaitan antara kualitas SDM dan pengelolaan laporan keuangan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara purposive sampling, yaitu teknik pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian [13]. Informan penelitian meliputi kepala desa, direktur BUMDes, bendahara BUMDes, sekretaris BUMDes, dan pengelola unit usaha. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi seperti laporan keuangan BUMDes, laporan kegiatan usaha, peraturan desa, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memperoleh informasi mendalam mengenai kualitas SDM, proses penyusunan laporan keuangan, serta strategi pengembangan usaha BUMDes. Observasi dilakukan terhadap aktivitas pengelolaan keuangan dan operasional usaha untuk memahami praktik yang berlangsung secara langsung. Dokumentasi digunakan untuk menelaah bukti tertulis yang mendukung hasil wawancara dan observasi [11], [9].

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai informan serta menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data [10]. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas dan keandalan temuan penelitian.

Analisis data yang dilakukan meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan [9]. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan memfokuskan data sesuai dengan tujuan penelitian. Penyajian data disusun dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan pemahaman, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap berdasarkan pola dan tema yang ditemukan selama proses analisis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara terstruktur, yang dilaksanakan dengan pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bottomallangga dan masyarakat di sekitar Bottomallangga. Berikut adalah informasi mengenai identitas informan yang berpartisipasi dalam penelitian ini :

Table 1 Data Informan

No	Nama	Jabatan
1.	Nurrahman	Ketua BUMDes
2.	Hernita Harun	Sekretaris BUMDes
3.	Ayu	Bendahara BUMDes
4.	Murni	Karyawan toko
5.	Emmang	Masyarakat

Sumber. BUMDes Bottomallangga, 2025

Tabel 2 Pendidikan Terakhir Informan

No	Jenjang Pendidikan Terakhir	Total
1	SLTA (SMA)	4 Orang
2	S1	1 Orang

Sumber. BUMDes Bottomallangga, 2025

Tabel pendidikan terakhir informan menunjukkan bahwa jumlah informan yang pendidikan terakhir SLTA sebanyak 4 Orang dan jenjang pendidikan terakhir S1 sebanyak 1 Orang.

Untuk lebih memahami bagaimana kualitas SDM pengelola laporan keuangan dan pengembangan BUMDes Bottomallangga maka penulis melakukan wawancara dengan pihak yang terkait dengan SDM dan pengembangan BUMDes. Adapun hasil wawancara yang dilakukan penulis seperti pada tabel 3 dibawah ini :

Tabel 3. Hasil Wawancara Dengan Kepala BUMDes

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana latar belakang berdirinya BUMDes Bottomallangga?	Berdasarkan pertimbangan untuk meningkatkan kemampuan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintah dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan sesuai dengan kebutuhan.
2.	Apa tujuan berdirinya BUMDes Bottomallangga?	Untuk meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintah dan meningkatkan pendapatan melalui berbagai usaha ekonomi masyarakat yang sesuai kebutuhan dan potensi desa dengan unit usaha yang dimiliki BUMDes serta berharap dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa.
3.	Apakah ada manfaat dari berdirinya BUMDes?	Jelas ada, Karena BUMDes Bottomallangga menciptakan lapangan pekerjaan serta dapat membantu perekonomian dan pendapatan desa.
4.	Apa saja program usaha yang ditangani BUMDes Bottomallangga?	Ada dua unit usaha yang ditangani yaitu unit Toko Grosir Sarassang dan unit Penyewaan Kursi.
5.	Dari mana asal modal BUMDes Bottomallangga?	Modal awal BUMDes Bottomallangga berasal dari pernyataan modal desa yang dialokasikan melalui anggaran pendapatan dan belanja desa.
6.	Bagaimana system akuntansi yang berjalan di BUMDes Bottomallangga?	System akuntansi di BUMDes masih belum berjalan sepenuhnya.
7.	Pertanggungjawaban laporan keuangan BUMDes Bottomallangga diserahkan kepada pihak mana?	Diserahkan kepada Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Bottomallangga.

Tabel 4. Hasil Wawancara Dengan Bendahara BUMDes

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Pedoman apa yang anda gunakan dalam penyusunan laporan keuangan BUMDes Bottomallangga?	Penyusunan laporan keuangan hanya mencatat laporan penjualan dan pengeluaran.
2.	Bagaimana system pencatatan pelaporan keuangan BUMDes Bottomallangga?	Dalam system pencatatan pelaporan keuangan BUMDes langsung melaporkan pendapatan dan pengeluaran pada saat pelaporan priode tertentu.
3.	Bagaimana jika system akuntansi yang sudah ada sekarang ini pada BUMDes Bottomallangga diganti dengan system akuntansi yang berlaku umum dan sesuai ketentuan pemerintah?	Jika system akuntansi yang kami pakai dan harus diganti dengan system akuntansi yang berlaku umum atau yang sesuai dengan peraturan pemerintah kami akan menerima dan menjalankan system tersebut. Dikarnakan salah satu kendala kami dalam menjalankan unit usaha BUM Desa Mario Marennu yaitu kurangnya pemahaman akuntansi dalam pencatatan laporan keuangan.
4.	Apakah ada kendala yang dihadapi dalam penyusunan laporan keuangan?	Kendala yang dihadapi dalam penyusunan laporan keuangan yaitu kurangnya pengetahuan tentang penerapan akuntansi.

Tabel 5. Hasil Wawancara Dengan Karyawan Toko Grosir BUMDes

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana perkembangan unit usaha yang didirikan BUMDes Bottomallangga hingga saat ini ?	ha penyewaan kursi didirikan masyarakat memberikan respon positif dengan membantu pengadaan usaha tersebut. Penyewa kursi di BUMDes kami cukup bertambah setiap bulan, bahkan ada penyewa yang berasal dari desa lain. Namun seiring bertambahnya pesaing, penyewa turun secara signifikan, beberapa kursi rusak, dan biaya sewa yang tidak dibayarkan menyebabkan usaha ini memudar. Untuk usaha simpan pinjam ini hanya berjalan sebentar karena pinjaman yang tidak dibayar dan penagihannya sulit. Usaha toko grosir berjalan dengan lancar karena pada awalnya di desa ini tidak ada toko grosir dan toko grosir sarassang didirikan ditempat yang strategis. Namun seiring waktu muncul pesaing disekitar yang menjual dengan harga yang lebih murah menyebabkan toko grosir sarassang sepi bahkan tutup untuk sementara waktu.

Tabel 6. Hasil Wawancara Dengan Sekretaris BUMDes

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah para pengelola laporan keuangan sudah mendapatkan pelatihan atau pendidikan khusus di bidang akuntansi dan manajemen keuangan?	Belum ada pelatihan atau pendidikan khusus terkait bidang akuntansi di BUMDes Bottomallangga.
2.	Apakah BUMDes Bottomallangga menggunakan software atau sistem akuntansi tertentu dalam proses pembuatan laporan keuangan?	Dalam pembuatan laporan keuangan belum menggunakan software atau system akuntansi karena dalam system pencatatan pelaporan keuangan BUMDes langsung melaporkan pendapatan dan pengeluaran.

Table 7. Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Sekitar BUMDes

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah BUMDes mendirikan unit usaha sesuai dengan kebutuhan masyarakat? Apa saja unit usaha itu?	Unit usaha BUMDes Bottomallangga saat awal didirikan sesuai dengan kebutuhan msyarakat dan hasi rapat. Unit usaha yang didirikan yang pertama itu usaha penyewaan kursi, lalu simpan pinjam, dan Toko Grosir Sarassang.
2.	Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan unit usaha BUMDes Bottomallangga?	Masyarakat antusias membantu pembangunan unit usaha BUMDes.

Sumber : wawancara dengan informan BUMDes Bottomallangga, 2025

Hasil wawancara terhadap 5 informan yang terdiri dari pegawai dan masyarakat sekitar BUMDes Bottomallangga yang terlibat langsung dalam pengembangan BUMDes menunjukkan berbagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan.

Analisis terhadap laporan keuangan BUMDes Bottomallangga yang dihasilkan setiap bulannya atau setiap tahunnya belum bisa dikatakan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang cocok untuk BUMDes yaitu SAK ETAP. Berdasarkan observasi langsung

terhadap BUMDes Bottomallangga, ada beberapa alasan lainnya yang menyebabkan tidak ada penyusunan laporan keuangan oleh BUMDes Bottomallangga sehingga dapat menyebabkan kemampuan menyusun laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap kinerja mereka. Adapun alasannya yaitu sebagai berikut:

- a. Kurangnya pengetahuan atau keterampilan yang berhubungan tentang penerapan SAK ETAP.
- b. Kurangnya perhatian pengelola akuntansi.
- c. Menurutnya dalam penerapan SAK ETAP tidak begitu berpengaruh terhadap kelangsungan kinerja mereka.
- d. Pihak BUMDes Bottomallangga lebih mengutamakan pengalaman peningkatan kinerja dibandingkan membuat laporan keuangan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan SAK ETAP sebagai landasan penulisan laporan keuangan di BUMDes Bottomallangga. Menggunakan SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) sebagai landasan penulisan laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki beberapa alasan yang sangat relevan, mengingat sifat dan kebutuhan organisasi BUMDes. Berikut adalah beberapa alasan utama:

- a. Kesederhanaan dan Kemudahan Penerapan
BUMDes biasanya merupakan entitas yang lebih kecil, dengan sumber daya yang terbatas dan operasional yang tidak sebesar perusahaan besar. SAK ETAP dirancang khusus untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik seperti BUMDes, sehingga menggunakan standar ini memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang lebih sederhana dan tidak memerlukan prosedur akuntansi yang rumit. Hal ini juga memudahkan bagi pengelola BUMDes yang mungkin tidak memiliki latar belakang akuntansi yang kuat.
- b. Biaya Penyusunan yang Lebih Rendah
Karena standar akuntansi ini lebih sederhana, biaya yang dikeluarkan untuk penyusunan laporan keuangan menjadi lebih terjangkau. BUMDes dapat mengalokasikan dana yang terbatas mereka untuk kepentingan lain yang lebih mendesak, tanpa harus mengeluarkan biaya besar untuk mengikutu standar akuntansi yang lebih kompleks seperti IFRS.
- c. Memenuhi Kebutuhan Pelaporan yang Transparan dan Akuntabel
Meskipun BUMDes bukan entitas yang terdaftar di bursa saham atau memiliki akuntabilitas publik, tetap diperlukan transparansi dalam pengelolaan keuangan untuk membangun kepercayaan masyarakat desa dan pemerintah. SAK ETAP memberikan kerangka yang cukup jelas bagi BUMDes untuk menyusun laporan keuangan yang akurat dan dapat dipahami oleh pihak terkait, seperti pemerintah desa, warga, dan lembaga keuangan yang mungkin terlibat.
- d. Penyederhanaan Proses Pelaporan untuk Entitas yang Tidak Terlalu Kompleks
BUMDes umumnya memiliki struktur yang tidak sekompleks perusahaan besar dan kegiatan usahanya lebih sederhana. Dengan menggunakan SAK ETAP, laporan keuangan yang dihasilkan tetap relevan dan sesuai dengan tingkat kompleksitas operasional BUMDes. Hal ini menjadikan proses pelaporan lebih efisien dan tidak memberatkan.
- e. Mendukung Pengelolaan Keuangan yang Baik
Menggunakan SAK ETAP dapat membantu BUMDes dalam mengelola keuangan dengan lebih baik, karena standar ini mengedepankan prinsip-prinsip dasar akuntansi yang relevan, seperti kewajaran, konsistensi, dan pruden. Ini penting bagi BUMDes untuk memastikan bahwa semua transaksi tercatat dengan baik dan informasi keuangan yang disajikan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya.
- f. Peningkatan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa
BUMDes merupakan bagian dari entitas yang dikelola oleh pemerintah desa, dan pengelolaannya perlu akuntabilitas yang jelas. Dengan mengacu pada SAK ETAP, BUMDes dapat menunjukkan bahwa mereka mengelola keuangan dengan transparansi dan profesionalisme, yang akan memudahkan dalam pengawasan oleh pihak-pihak terkait, termasuk masyarakat desa dan pemerintah.
- g. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Beberapa peraturan pemerintah terkait dengan pengelolaan keuangan desa juga mengharuskan BUMDes untuk menyusun laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. **SAK ETAP** adalah standar yang secara khusus ditujukan untuk

entitas yang tidak berorientasi pada keuntungan atau yang berukuran kecil, sehingga sangat sesuai untuk digunakan oleh BUMDes sesuai dengan regulasi yang ada.

SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) adalah suatu standar akuntansi yang dirancang khusus untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik, seperti UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) atau organisasi yang tidak berorientasi pada keuntungan. Tujuan utama SAK ETAP adalah untuk memberikan panduan yang lebih sederhana dalam penyusunan laporan keuangan bagi entitas-entitas yang lebih kecil, agar lebih mudah dipahami dan diterapkan, namun tetap mempertahankan kualitas informasi keuangan yang relevan.

SAK ETAP ini juga dirancang agar tidak terlalu rumit dan lebih sesuai dengan kebutuhan serta kapasitas entitas kecil yang umumnya tidak memiliki sumber daya untuk menerapkan standar akuntansi yang lebih kompleks, seperti SAK Umum atau IFRS (International Financial Reporting Standards).

Membuat laporan keuangan dengan landasan SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) relatif lebih sederhana dibandingkan dengan standar akuntansi yang lebih kompleks. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP:

a. *Persiapkan Neraca (Balance Sheet)*

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Dalam SAK ETAP, neraca disusun dengan dua bagian utama, yaitu: Aset, Kewajiban (*Liabilitas*), dan Ekuitas.

b. *Susun Laporan Laba Rugi (Income Statement)*

Laporan laba rugi menunjukkan hasil kinerja perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini melaporkan pendapatan dan biaya untuk menghasilkan laba atau rugi. Berdasarkan SAK ETAP, laporan laba rugi disusun sebagai berikut: Pendapatan, Beban, Laba/Rugi.

c. *Laporan Perubahan Ekuitas (statement of changes in equity)*

Laporan ini disusun setelah neraca lajur dan juga laporan laba rugi sudah ada. Karena ketika membuat laporan ekuitas, kita membutuhkan laporan lajur laporan dan laporan laba rugi sebagai sumber data laporan perubahan modal.

d. *Susun Laporan Arus Kas (Cash Flow Statement)*

Laporan arus kas menunjukkan pergerakan kas yang diterima dan dikeluarkan oleh perusahaan dalam periode tertentu. Laporan ini dibagi menjadi tiga bagian: Arus Kas dari Aktivasi Operasional, Arus Kas dari Aktivasi Investasi, dan Arus Kas dari Pendanaan.

e. *Catatan atas Laporan Keuangan*

Catatan atas laporan keuangan adalah bagian penting untuk menjelaskan kebijakan akuntansi yang digunakan dan memberikan rincian tambahan yang tidak terlihat dalam laporan utama. Hal ini bisa meliputi penjelasan mengenai kebijakan aset, liabilitas, pendapatan, dan beban yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan.

Dalam hasil wawancara didapatkan bahwa BUMDes Bottomallangga belum menerapkan penerapan SAK ETAP sesuai dengan apa yang dikatakan oleh ketua BUMDes Bottomallangga Bapak Nurrahman bahwa dalam penerapan akuntansi di BUMDes Bottomallangga belum ada. Hal tersebut dikatakan juga oleh Bendahara BUMDes Bottomallangga Ibu Ayu bahwa dalam penerapan akuntansi di BUMDes Bottomallangga hanya ada dua pencatatan yaitu penjualan dan pembelian. Penjualan dikategorikan sebagai pendapatan BUMDes sedangkan untuk pembelian dikategorikan sebagai pengeluaran BUMDes Bottomallangga.

Hal tersebut tidak sesuai dengan penerapan akuntansi. Dalam penerapan akuntansi setidaknya harus melaporkan atau menyajikan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam menentukan laba usaha BUMDes Bottomallangga hanya melakukan pengurangan dari hasil penjualan dikurangi dengan hasil pembelian maka didapatkan berapa laba atau keuntungan yang didapatkan. Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa BUMDes Bottomallangga tidak melakukan pencatatan atau jurnal sebagaimana yang diatur dalam SAK ETAP.

Pembahasan

Pembahasan penelitian ini menegaskan peran strategis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai instrumen penggerak ekonomi desa melalui pengelolaan usaha berbasis potensi lokal.

Temuan penelitian di BUMDes Bottomallangga, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, menunjukkan bahwa keberhasilan BUMDes tidak hanya ditentukan oleh jenis unit usaha yang dijalankan, tetapi sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya dalam pengelolaan laporan keuangan dan perencanaan pengembangan usaha.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan laporan keuangan BUMDes Bottomallangga belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Kondisi ini mencerminkan keterbatasan pemahaman pengelola terhadap konsep dasar akuntansi, sehingga pencatatan keuangan masih bersifat sederhana dan terbatas pada arus kas masuk dan keluar. Ketidakterapan sistem akuntansi yang terstruktur berdampak pada rendahnya kualitas informasi keuangan yang dihasilkan, sehingga laporan keuangan belum dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai alat evaluasi kinerja dan dasar pengambilan keputusan usaha. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa kompetensi SDM merupakan faktor kunci dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BUMDes.

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa keterbatasan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor utama yang menghambat pengelolaan keuangan BUMDes secara akuntabel. Penelitian [1] menemukan bahwa rendahnya pemahaman akuntansi pengelola BUMDes menyebabkan laporan keuangan belum disusun sesuai standar, sehingga fungsi laporan keuangan sebagai alat pertanggungjawaban dan dasar pengambilan keputusan belum optimal. Temuan tersebut konsisten dengan kondisi BUMDes Bottomallangga, di mana pencatatan keuangan masih bersifat sederhana dan belum mengacu pada SAK ETAP.

Hasil penelitian ini juga memperkuat pandangan Mahmudi yang menegaskan bahwa laporan keuangan sektor publik seharusnya disusun tidak hanya sebagai pemenuhan kewajiban administratif, tetapi sebagai instrumen untuk menilai kinerja dan efektivitas pengelolaan organisasi [8]. Pada BUMDes Bottomallangga, keterbatasan kompetensi SDM menyebabkan laporan keuangan belum mampu memberikan informasi yang memadai bagi pengelola dalam merancang strategi pengembangan usaha. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan pengelolaan keuangan BUMDes tidak hanya terletak pada ketersediaan regulasi atau standar akuntansi, tetapi pada kemampuan SDM dalam menerjemahkan standar tersebut ke dalam praktik operasional.

Dari aspek pengembangan usaha, temuan penelitian ini selaras dengan penelitian Sari dan Rahmawati yang menyatakan bahwa lemahnya pengelolaan keuangan dan rendahnya partisipasi masyarakat berdampak pada terbatasnya kontribusi BUMDes terhadap peningkatan ekonomi desa [20]. Kondisi ini juga terlihat pada BUMDes Bottomallangga, di mana unit usaha yang telah berjalan belum mampu memberikan nilai tambah yang signifikan akibat keterbatasan modal, persaingan pasar, serta minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan usaha.

Namun demikian, penelitian ini memiliki perbedaan dengan beberapa penelitian terdahulu yang lebih menekankan pada aspek kelembagaan dan regulasi BUMDes. Penelitian ini secara khusus menyoroti keterkaitan antara kualitas SDM pengelola laporan keuangan dan peluang pengembangan usaha BUMDes. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi empiris dengan menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas SDM akuntansi merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan pengembangan usaha BUMDes secara berkelanjutan.

Dari sisi pengembangan usaha, BUMDes Bottomallangga telah menjalankan beberapa unit usaha, seperti toko grosir dan penyewaan kursi. Namun, unit usaha tersebut belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan ekonomi desa. Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan modal, tingginya tingkat persaingan pasar, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan BUMDes. Rendahnya keterlibatan masyarakat menunjukkan bahwa fungsi sosial BUMDes sebagai wadah ekonomi kolektif desa belum berjalan secara optimal, sehingga potensi ekonomi lokal belum sepenuhnya termanfaatkan.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga mengidentifikasi adanya peluang pengembangan usaha yang dapat dimanfaatkan oleh BUMDes Bottomallangga. Peluang tersebut antara lain pengembangan Toko Grosir Sarassang menjadi toko distributor yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih luas, pengembangan usaha kerajinan tangan berupa pembuatan parang sebagai produk khas lokal, serta pengolahan gula aren menjadi produk bernilai tambah seperti palm sugar dan gula aren cair dengan kemasan dan strategi promosi yang lebih menarik. Pemanfaatan peluang ini membutuhkan dukungan pengelolaan keuangan yang profesional serta perencanaan usaha yang matang agar dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha BUMDes.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa peningkatan kualitas SDM pengelola laporan keuangan dan penguatan strategi pengembangan usaha merupakan dua aspek yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Pengelolaan keuangan yang baik akan mendukung pengambilan keputusan usaha yang lebih tepat, sementara pengembangan usaha yang berkelanjutan akan memperkuat posisi BUMDes sebagai pilar ekonomi desa. Dengan demikian,

penelitian ini mengisi celah penelitian sebelumnya dengan menunjukkan bahwa kualitas SDM pengelola laporan keuangan memiliki implikasi langsung terhadap efektivitas pengelolaan dan pengembangan usaha BUMDes.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bottomallangga, dapat disimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola laporan keuangan masih agak terbatas, dengan kurangnya pemahaman mengenai akuntansi dan manajemen keuangan. Pencatatan laporan keuangan yang dilakukan masih sederhana, tanpa penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

Pengelolaan dan pengembangan usaha menghadapi kendala, di antaranya kurangnya pelatihan bagi pengelola, terbatasnya modal usaha, dan persaingan yang semakin ketat, sehingga unit usaha seperti toko grosir dan penyewaan kursi mengalami penurunan omzet. Namun, meskipun menghadapi berbagai tantangan, BUMDes Bottomallangga masih memiliki peluang untuk berkembang dan memiliki peluang usaha di bidang lainnya.

Saran

1. Saran untuk BUMDes
 - a. Pengelola BUMDes perlu mendapatkan pelatihan akuntansi dan manajemen keuangan agar dapat menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku. BUMDes sebaiknya menerapkan Standar Akuntansi yang sesuai dalam pengelolaan keuangan BUMDes seperti SAK ETAP.
 - b. Untuk meningkatkan daya saing, BUMDes dapat mengembangkan unit usaha baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta menerapkan strategi pemasaran digital.
2. Saran untuk peneliti selanjutnya
 - a. Mengingat penelitian ini menemukan bahwa BUMDes Bottomallangga belum menerapkan Standar Akuntansi Keuangan yang sesuai, penelitian berikutnya dapat lebih fokus pada penerapan dan evaluasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) di berbagai BUMDes untuk melihat efektivitas dan kendala dalam implementasinya.
 - b. Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan usaha BUMDes, seperti strategi bisnis, kebijakan pemerintah, dukungan masyarakat, atau adopsi teknologi dalam operasional BUMDes.
 - c. Peneliti selanjutnya dapat melakukan studi komparatif antara beberapa BUMDes di berbagai daerah guna mengidentifikasi faktor keberhasilan dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan serta pengembangan usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anggraeni, M. D., & Fitriyah, F. (2019). Pengelolaan keuangan badan usaha milik desa (BUMDes) dalam mewujudkan akuntabilitas. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(2), 336–352.
- [2] Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- [3] Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)*. Jakarta: IAI.
- [4] Khaerani, D., Mukhlis, A., & Tabroni. (2023). Strategi perencanaan sumber daya manusia untuk meningkatkan kinerja organisasi. *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen Tirtayasa (JRBMT)*, 7(1), 41–50.
- [5] Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- [6] Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2020). *Intermediate accounting* (17th ed.). Hoboken: Wiley.

- [7] Mahsun, M. (2016). *Pengukuran kinerja sektor publik*. Yogyakarta: BPFE.
- [8] Mahmudi. (2019). *Akuntansi kinerja sektor publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- [9] Mallette, L. A., & Saldaña, J. (2019). Teaching qualitative data analysis through gaming. *Qualitative Inquiry*, 25(9-10), 1085-1090.
- [10] Moleong, L. J. (2022). A. Jenis dan Pendekatan Penelitian. *Salema Empat*.
- [11] MSDM, I. Sugiyono.(2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta. Sianipar, R., & Salim, V.(2019). Faktor Etos Kerja Dan Lingkungan Kerja Dalam Membentuk 'Loyalitas Kerja'Pegawai Pada Pt Timur Raya Alam Damai. Anuar, S. 2019. Th. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8(6), 3674.
- [12] Nugroho, I. (2018). Perencanaan Pembangunan Ekowisata dan Desa Wisata. *Bappenas Working Papers*, 1(1), 98-103.
- [13] Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- [14] Pratiwi, D. A., & Wahyuni, S. (2020). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan BUMDes. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 13(1), 1–14.
- [15] Rahayu, S., & Suryani, E. (2021). Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan BUMDes. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 22(2), 134–146.
- [16] Ridwan, Z. (2015). Urgensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pembangunan Perekonomian Desa. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8 (3), 424–440. DOI: <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.314>.
- [17] Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- [18] Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa*.
- [19] Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- [20] Sari, N., & Rahmawati, L. (2022). Pengembangan usaha badan usaha milik desa berbasis potensi lokal. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 7(1), 55–67.
- [21] Wibisono, G., & Widodo, S. (2021). Implementasi standar akuntansi pada badan usaha milik desa. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 16(2), 89–101.